

## Analisis bibliometrik korupsi di sektor publik

Ilmi Farikhoh<sup>a</sup>, Anis Chariri<sup>b\*</sup>

Universitas Diponegoro. Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang 50241, Indonesia

<sup>a</sup> farikhoh@gmail.com; <sup>b</sup> anis\_chariri@live.undip.ac.id

\* Corresponding Author

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan aliran penelitian utama, pengembangan penelitian, dan arah penelitian lebih lanjut dalam studi korupsi secara sistematis. Menggunakan analisis bibliometrik untuk menganalisis 759 artikel dalam database Scopus dari tahun 2011 hingga 2020 melalui software VOSviewer versi 1.6.17. Penelitian Ini menyimpulkan bahwa korupsi sektor publik adalah topik yang menarik secara internasional. Artikel oleh Chan et al. (2011), Williams dan Shahid (2016), dan artikel dalam Journal of Financial Crime merupakan sumber referensi utama. Kata kunci tertentu, seperti manajemen, regulasi, penghindaran pajak, perawatan kesehatan, dan investasi memberikan fokus potensial untuk penelitian di masa depan.

**Kata Kunci:** Korupsi; Sektor; Publik; Bibliometrik

**How to Cite:** Farikhoh, I., & Chariri, A. (2022). A bibliometric analysis of corruption in the public sector. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 63–76. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.866>



### Pendahuluan

Korupsi adalah kejahatan yang unik dan menjadi ancaman global (Nuswantara & Maulidi, 2020). Korupsi juga merupakan penipuan paling umum dan merugikan di Indonesia (ACFE Indonesia Chapter, 2020). Organisasi yang paling dirugikan akibat korupsi adalah organisasi di sektor pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dalam kurun waktu lima tahun sejak 2015 hingga 2020 terus meningkat, sementara jumlah kasus korupsi dan jumlah tersangka korupsi yang diadili oleh penegak hukum semakin berkurang (Alamsyah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pemerintah setiap tahun semakin lemah. Tata kelola yang buruk ini menjadikan sektor pemerintah sebagai 'tambang emas' bagi para pelaku kecurangan dan korupsi. Padahal, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah harapan seluruh rakyat Indonesia (Muttiarni, 2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021) mendefinisikan korupsi sebagai upaya untuk menyalahgunakan uang negara untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga mengacu pada penyalahgunaan jabatan publik atau wewenang untuk keuntungan pribadi melalui penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penggelapan (Fisman & Golden, 2017; Siddique & Ghosh, 2014). Korupsi itu sendiri, menurut Singleton dan Singleton (2010) ditandai dengan pola perilaku di mana karyawan suatu organisasi berkolaborasi dengan individu lain secara ilegal. Hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi di luar organisasi yang bersangkutan dan biasanya ditandai dengan konflik kepentingan, suap, gratifikasi ilegal, dan pemerasan ekonomi. Dalam mendefinisikan konsep ini, (Fisman & Golden, 2017) juga menekankan bahwa korupsi biasanya terjadi dalam kondisi yang menimbulkan masalah etika yang mengakibatkan semakin besar keinginan individu untuk berperilaku koruptif. Korupsi di sektor publik melibatkan penyelenggara negara yang menggunakan fasilitas negara atas nama pribadi dan kepentingannya, atau tindakan kekuasaan yang menyimpang dari aturan yang ditetapkan oleh negara dan pada gilirannya menyebabkan kerugian negara (Deni, 2010; Faisal, 2018). Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi terjadi apabila setiap orang dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum dengan menyalahgunakan uang negara, atau uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Sofhian, 2020).

Maraknya korupsi di Indonesia nampaknya sulit diberantas dan mengakar kuat. Dalam beberapa hal, tampak pelanggaran hukum yang kini sudah menjadi kebiasaan (Yanti, 2021). Sebagai-

mana dicatat oleh (Bihaming, 2018), munculnya korupsi yang semakin meningkat meskipun ada semangat reformasi dan transparansi yang dipromosikan oleh pemerintah adalah sebuah ironi yang mencolok. Ada banyak penelitian tentang korupsi. Misalnya, penelitian yang diterbitkan oleh Matulesy et al. (2021); Nugraha dan Etikariena (2021); Putri dan Yanti (2020); Yanti (2021) menganalisis faktor-faktor pemicu yang menyebabkan perilaku korupsi dari individu yang bekerja di sektor publik. Studi empiris ini merupakan pengayaan penting dari basis pengetahuan di bidang ini. Namun, analisis yang objektif dan inklusif dari kumpulan pengetahuan ini masih harus dilakukan untuk menginformasikan penelitian, kebijakan, dan praktik di masa depan.

Sejumlah analisis bibliometrik korupsi telah dilakukan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Uribe-Toril et al. (2019) mengulas 180 artikel dengan topik korupsi dan kewirausahaan dari tahun 2019 hingga 2020 menggunakan database Scopus. Bahoo (2020) menyelesaikan review penelitian korupsi di sektor perbankan berdasarkan 819 artikel dari ISI Web of Knowledge (ISI WOK) dari tahun 1969 hingga 2019. Sforza et al. (2020) melakukan review penelitian korupsi di bidang kesehatan berdasarkan 80 artikel dari database Scopus dan EBSCO dari tahun 2006 hingga 2017. Zhai et al. (2021) menggunakan sampel penelitian sebanyak 542 artikel tentang korupsi di sektor konstruksi dari Web of Science dari tahun 2000 hingga 2020. Terakhir, Bahoo et al. (2021) melakukan analisis bibliometrik korupsi di sektor ekonomi dengan sampel 4.488 artikel dari ISI Web of Knowledge (ISI WOK) dari tahun 1968 hingga 2019. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Basis data Scopus lebih disukai sebagai sumber data karena memiliki cakupan hampir 60% lebih besar dari basis data Web of Science (WoS) dan ISI Web of Knowledge (ISI WOK) (Bahoo, 2020; Bahoo et al., 2021; Zhai et al., 2021). Jumlah artikel yang diterbitkan dan periode publikasi juga harus dipertimbangkan dalam penelitian lebih lanjut karena keterbatasan dalam hal ini dalam studi Sforza et al. (2020) dan Uribe-Toril et al. (2019). Atas dasar itu, penelitian pemetaan kembali korupsi perlu dilakukan mengingat maraknya fenomena korupsi saat ini dan keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dengan menggunakan metodologi ini.

Penelitian ini dalam beberapa hal merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bahoo (2020); Bahoo et al. (2021); Uribe-Toril et al. (2019); Zhai et al. (2021) yang melakukan studi tinjauan literatur dan analisis bibliometrik korupsi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sumber database artikel, periode sampel artikel, dan penggunaan kata kunci artikel. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi analisis bibliometrik dengan menggunakan kata kunci “korupsi” dan “sektor publik”. Penggunaan kata kunci tersebut dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya kasus korupsi yang terjadi di sektor publik: dari 271 pada 2019, menjadi 444 pada 2020. Demikian menurut lembaga survei independen di Indonesia yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (Alamsyah, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, menganalisis dan memetakan alur penelitian yang ada secara sistematis. dalam literatur tentang korupsi di sektor publik, kemudian, kedua, secara sistematis menganalisis dan memetakan perkembangan penelitian di bidang korupsi di sektor publik dengan menentukan artikel jurnal utama, negara, lembaga, penulis, dan jaringan di bidang ini. Ketiga, berusaha menganalisis secara sistematis dan memetakan arah terbaik untuk penelitian lebih lanjut. Ini berhasil mengidentifikasi area penelitian utama, kesenjangan, tren yang muncul, dan pola dalam penelitian sebelumnya. Dengan memetakan bagaimana diskusi global tentang korupsi di sektor publik berlangsung, studi ini memfasilitasi pengembangan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan melihat bagaimana hal ini terjadi di negara lain. Metodologi pencegahan korupsi ini dapat dipertimbangkan untuk diadopsi di Indonesia. Para peneliti di Indonesia juga dapat menggunakan informasi ini untuk memandu penelitian mereka sendiri tentang korupsi, mengingat masih banyak bidang penelitian yang masih jelas diperlukan berdasarkan hasil penelitian ini.

### Metode

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari database Scopus, dengan dua pertimbangan: (1) database Scopus paling banyak digunakan dalam penelitian bibliometrik; (2) jika dibandingkan dengan database Web of Science (WoS), database Scopus memiliki cakupan yang

jauh lebih luas (Strozzi et al., 2017). Artikel ilmiah terbitan 2011 hingga 2020 diunduh dari database Scopus dengan kata kunci “korupsi di sektor publik”. Pencarian menggunakan kata kunci tersebut kemudian dibatasi pada judul, abstrak, dan kata kunci. Jenis dokumen terbatas hanya untuk artikel berbahasa Inggris. Informasi terkait pengumpulan dengan menggunakan kata kunci yang diidentifikasi adalah sebagai berikut (Gambar 1).

759 document results

```
TITLE-ABS-KEY(corruption AND in AND public AND sector) AND (LIMIT-TO(PUBYEAR, 2020) OR LIMIT-TO(PUBYEAR, 2019) OR LIMIT-TO(PUBYEAR, 2018) OR LIMIT-TO(PUBYEAR, 2017) OR LIMIT-TO(PUBYEAR, 2016) OR LIMIT-TO(PUBYEAR, 2015) OR LIMIT-TO(PUBYEAR, 2014) OR LIMIT-TO(PUBYEAR, 2013) OR LIMIT-TO(PUBYEAR, 2012) OR LIMIT-TO(PUBYEAR, 2011)) AND (LIMIT-TO(DOCTYPE, "ar")) AND (LIMIT-TO(LANGUAGE, "English")) AND (LIMIT-TO(SRCTYPE, "j"))
```

**Gambar 1.** Seleksi Artikel dan Kriteria Evaluasi

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode bibliometrik melalui program VOSviewer 1.6.17. Analisis jaringan bibliometrik dilakukan dengan lima metrik: *citation*, *co-citation*, *bibliographic coupling*, *co-occurrence*, dan *co-authorship*. Analisis kutipan adalah teknik dasar dalam pemetaan ilmiah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kutipan mencerminkan hubungan intelektual antara publikasi yang terbentuk ketika satu publikasi mengutip publikasi lain (Donthu et al., 2021). Oleh karena itu, dengan menggunakan kutipan, peneliti dapat menganalisis publikasi yang paling berpengaruh di bidang penelitian yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman tentang dinamika intelektual di bidang itu. Unit analisis yang dipilih dalam melakukan analisis sitasi adalah unit dokumen dengan jumlah dokumen sitasi minimal = 0; sehingga dari 759 dokumen, 759 memenuhi ambang batas. Parameter visualisasi yang dipilih terdiri dari skala = 1,00; variasi label berupa lingkaran dengan ukuran 0,50; panjang maksimal = 30; ukuran variasi garis = 0,50 dengan garis maksimum = 1000.

Analisis *co-citation* adalah teknik pemetaan sains yang mengasumsikan publikasi yang sering dikutip bersama memiliki kesamaan tematik. Manfaat menggunakan analisis *co-citation* adalah selain menemukan publikasi yang paling berpengaruh, Anda juga dapat menemukan kluster tematik. Analisis *co-citation* dilakukan di unit penulis dengan menggunakan metode penghitungan penuh. Pertimbangan analisis *co-citation* di unit penulis adalah bahwa satu penulis harus dikutip 20 kali. Dengan demikian, dari 33740 penulis, 139 penulis memenuhi minimal 20 kriteria ambang batas kutipan. Parameter visualisasi yang dipilih sama dengan parameter analisis kutipan.

Selanjutnya, penggabungan bibliografi adalah teknik pemetaan ilmiah yang digunakan berdasarkan asumsi bahwa dua publikasi yang memiliki referensi yang sama juga memiliki konten yang serupa. Teknik ini berguna untuk menganalisis hubungan antara kutipan publikasi dan untuk memahami masalah berkala atau perkembangan tema saat ini di bidang penelitian (Donthu et al., 2021). Penggabungan daftar pustaka dilakukan dalam satuan dokumen dengan metode penghitungan penuh. Pertimbangan penggabungan bibliografi dalam satuan dokumen adalah jumlah kutipan dokumen minimal = 1, sehingga dari 759 dokumen, 618 memenuhi ambang batas. Parameter visualisasi yang dipilih sama dengan parameter analisis kutipan.

Teknik *co-occurrence* digunakan untuk mengeksplorasi hubungan yang ada atau masa depan antara topik dalam area penelitian dengan berfokus pada konten tertulis dari publikasi itu sendiri. Jaringan *co-occurrence* kata kunci dilakukan di unit penulis, sedangkan kata kunci dibatasi setidaknya lima kejadian. Ini menghasilkan total 73 kata kunci. Parameter visualisasi yang dipilih sama dengan parameter analisis kutipan.

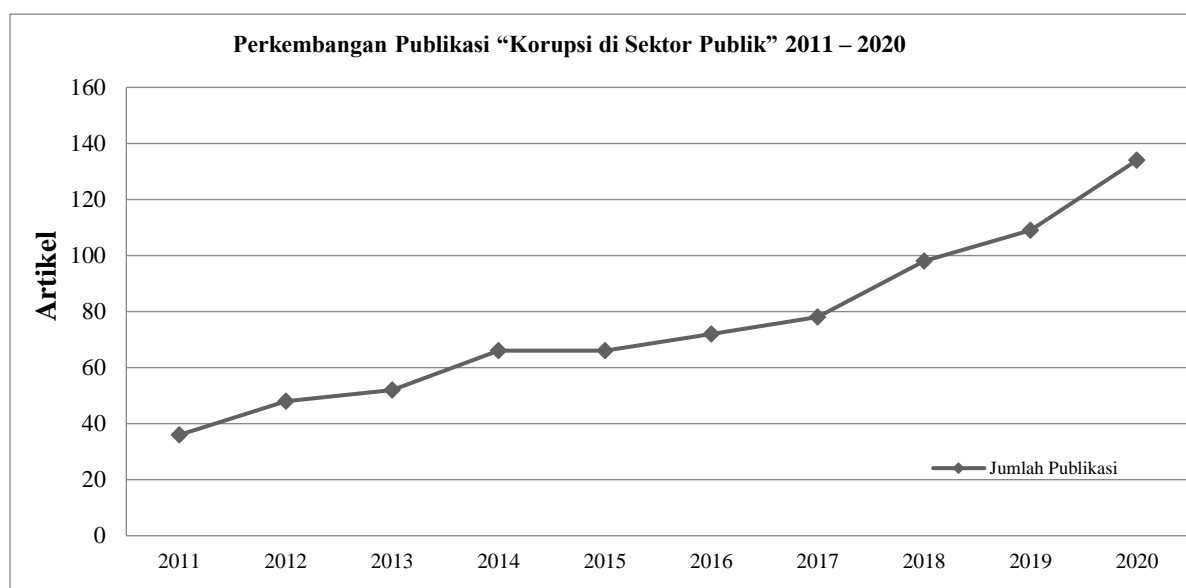
Akhirnya, teknik *co-authorship* digunakan untuk menguji interaksi sosial atau hubungan antara penulis dan afiliasi mereka dan dampaknya terhadap pengembangan bidang penelitian (Donthu et al., 2021). Jaringan *co-authorship* dilakukan di unit penulis dan negara dengan beberapa parameter yaitu jaringan kolaborasi antar penulis dipilih setidaknya dalam satu artikel penelitian. Dalam me-

netapkan jumlah ambang batas, peneliti harus berkolaborasi pada setidaknya satu artikel dan mengutipnya setidaknya 50 kali antara 2011 dan 2020. Jaringan *co-authorship* dari negara-negara yang berafiliasi dengan penulis dipilih yang memiliki setidaknya satu artikel antara 2011 dan 2020. Ambang batas diterapkan pada minimal sepuluh kutipan dari suatu negara, sehingga totalnya menjadi 72 negara. Parameter visualisasi yang dipilih sama dengan parameter analisis kutipan.

Untuk memvisualisasikan data bibliografi secara grafis, penelitian ini menggunakan software VOSviewer untuk menganalisis hubungan jaringan antar unit analisis yang berbeda. VOSviewer dipilih untuk penelitian ini karena kemampuannya untuk membuat peta berdasarkan data jaringan, data bibliografi, dan data teks serta kemampuannya untuk mendukung semua jenis file. File yang digunakan untuk visualisasi di VOSviewer adalah dalam format CSV dan berisi informasi bibliografi artikel.

### Hasil dan Pembahasan

Perkembangan publikasi “korupsi di sektor publik” tahun 2011-2020 tersaji pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Perkembangan Publikasi “Korupsi di Sektor Publik” 2011-2020

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak tahun 2011 publikasi artikel yang membahas tentang korupsi di sektor publik meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa topik tersebut relevan, dan menarik bagi para peneliti.

Sepuluh penulis paling produktif di bidang ini disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1.** Sepuluh Penulis Paling Produktif

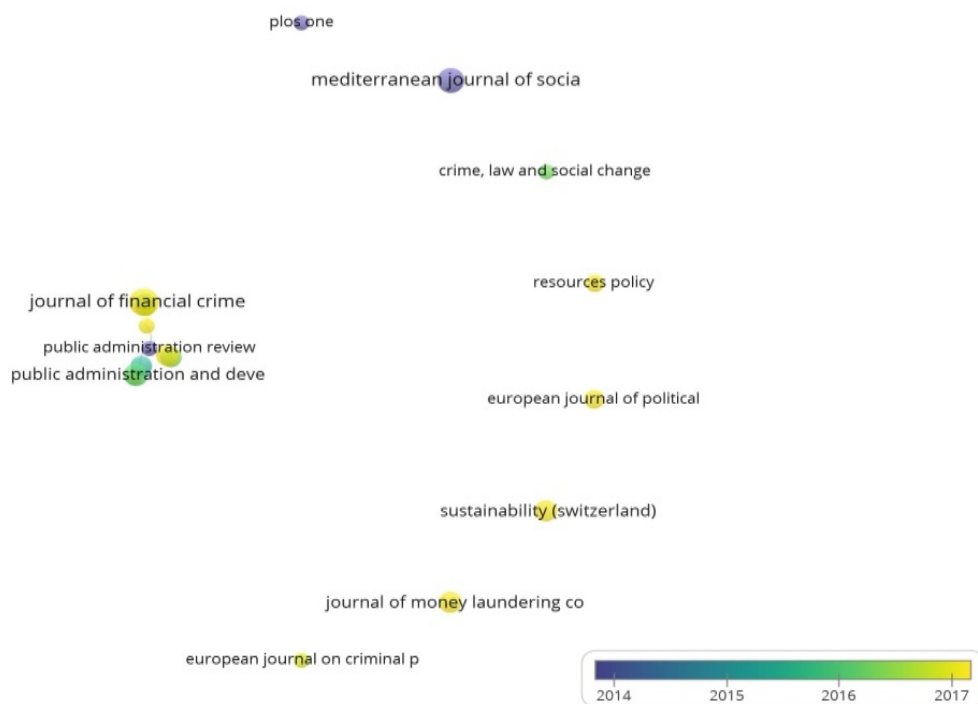
No.	Penulis	Artikel
1.	Chan, A.P.C.	8
2.	Williams, C.C.	8
3.	Prabowo, H.Y.	6
4.	Said, J.	6
5.	Alam, M.M.	5
6.	Johari, R.J.	5
7.	Le, Y.	5
8.	Charron, N.	4
9.	Fazekas, M.	4
10.	Graycar, A.	4

Chan et al. (2011); Williams dan Shahid (2016) telah melakukan penelitian paling banyak tentang topik korupsi di sektor publik, dengan keduanya telah menerbitkan total delapan artikel. Informasi yang dikumpulkan tentang subjek penelitian korupsi di sektor publik disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2.** Bidang Subjek Penelitian

No.	Area Subjek	Artikel
1.	<i>Social Sciences</i>	485
2.	<i>Economics, Econometrics, and Finance</i>	235
3.	<i>Business, Management, and Accounting</i>	215
4.	<i>Arts and Humanities</i>	84
5.	<i>Environmental Science</i>	69
6.	<i>Medicine</i>	67
7.	<i>Engineering</i>	45
8.	<i>Decision Sciences</i>	26
9.	<i>Computer Science</i>	23
10.	<i>Energy</i>	19

Berdasarkan database Scopus yang dikumpulkan, artikel tentang korupsi di sektor publik telah diteliti secara luas di bidang ilmu sosial, dengan total 485 artikel yang diterbitkan. *Journal of Financial Crime* merupakan jurnal yang paling banyak menerbitkan artikel tentang topik korupsi di sektor publik dengan lima belas artikel, *Mediterranean Journal of Social Sciences* mengikutinya dengan dua belas artikel, jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan dengan sepuluh artikel, kemudian *International Review of Administrative Sciences*, *Journal of Money Laundering Control*, dan *Sustainability Switzerland* masing-masing dengan sembilan artikel. Jurnal Internasional Manajemen Sektor Publik, Jurnal Etika Bisnis, dan Integritas Publik masing-masing memiliki delapan artikel, dan Jurnal Ekonomi Politik Eropa menerbitkan tujuh artikel dalam bidang ini. *Journal of Financial Crime*, *European Journal of Political Economy*, *Sustainability Switzerland*, dan *Journal of Money Laundering Control* adalah jurnal-jurnal yang paling baru menerbitkan topik ini. Data ini disajikan pada Gambar 3.

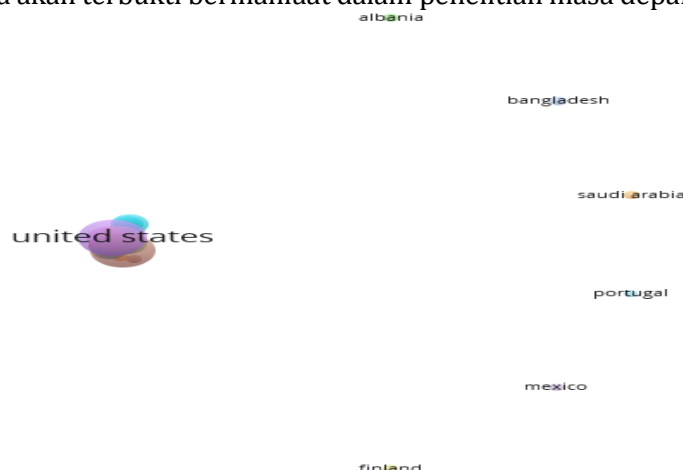
**Gambar 3.** Sumber Publikasi

Topik menarik berikutnya adalah afiliasi para peneliti ini. Universitas Teknologi MARA merupakan sumber penelitian yang signifikan tentang korupsi di sektor publik. Negara yang paling banyak menghasilkan penelitian di bidang ini adalah Amerika Serikat, dengan jumlah publikasi sebanyak 121 artikel (Gambar 4). Beberapa artikel tersebut antara lain:

- a. "Procurement issues in Malaysia" oleh Hui et al. (2011) membahas persepsi dua pemangku kepentingan utama dalam sistem pengadaan yaitu kontraktor dan petugas pengadaan mengenai isu-isu seperti akuntabilitas, transparansi, korupsi, integritas, dan kronisme terkait

sistem pengadaan publik di Malaysia. Penelitian dilakukan melalui wawancara selama sembilan bulan pada tahun 2007. Temuan yang dihasilkan antara lain kesimpulan bahwa permasalahan yang sering dikeluhkan kontraktor adalah maraknya campur tangan pihak luar dan dampak kronisme terhadap cara pemberian kontrak yang jatuh tempo. untuk malpraktik dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan prosedur sistem pengadaan

- b. *"Public Accountability System: Empirical Assessment of the Public Sector of Malaysia"* oleh Alam dan Said (2015) menganalisis praktik akuntabilitas sektor publik Malaysia dalam menanggapi laporan terbaru dari Auditor Jenderal yang mengungkapkan korupsi, kelemahan, dan kurangnya kontrol dalam manajemen aset di sektor publik. Sekitar 87,3% responden menyatakan bahwa institusi tempat responden bekerja secara umum menerapkan praktik akuntabilitas dengan baik. Namun, dalam layanan administrasi dan diplomatik, pendidikan, dan layanan medis atau kesehatan, jumlah ini turun di bawah rata-rata
- c. *"On self-selection of the corrupt into the public sector"* oleh Banerjee et al. (2015) menemukan bahwa calon pegawai negeri lebih banyak terlibat korupsi daripada calon pegawai di sektor swasta, meskipun korupsi sama-sama terjadi di kedua sektor
- d. *"Tax evasion, tax corruption, and stochastic growth"* oleh Célimène et al. (2016) menyajikan model pertumbuhan stokastik waktu terus menerus untuk mempelajari efek penghindaran pajak dan korupsi pajak pada tingkat dan volatilitas investasi swasta dan pengeluaran publik, yang keduanya merupakan faktor pertumbuhan. hasil penghindaran bagi sektor swasta tidak serta merta dipandang sebagai beban. Pasar modal yang tampil di sini memiliki peran yang sama dengan kebijakan pembebasan pajak. Dalam masyarakat di mana pangsa investasi swasta dalam persentase PDB tumbuh, di mana penipu pajak biasanya memilih untuk melindungi hasil kegiatan ilegal mereka dari lembaga keuangan resmi, dan di mana produktivitas belanja publik sering rendah, penghindaran pajak dan korupsi pajak dapat berkontribusi pada pengembangan modal swasta jika orang menemukan kesempatan untuk menginvestasikan hasil kegiatan ilegal mereka di pasar ekuitas
- e. *"Realizing sustainable development goals via online integrity framework disclosure: Evidence from Malaysian and Indonesian local authorities"* oleh Joseph et al. (2019) mengkaji sejauh mana pengungkapan informasi kerangka integritas di situs web otoritas lokal Malaysia dan Indonesia menggunakan prinsip isomorfisme koersif. Otoritas lokal Indonesia lebih proaktif dalam menerapkan inisiatif integritas, yang diterjemahkan ke dalam pelaporan yang lebih besar karena dipengaruhi oleh kekuatan koersif eksternal: legitimasi, visibilitas publik, reformasi sektor publik, dan struktur dukungan kelembagaan. Artikel ini menggunakan teori instiusional isomorphis sebagai mekanisme koersif yang meningkatkan pemahaman kerangka pengungkapan integritas. Untuk membangun pekerjaan ini, studi masa depan mungkin perlu mengembangkan daftar pengungkapan yang lebih baru dengan melakukan studi percontohan berdasarkan negara. Analisis yang lebih rinci melalui wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang alasan informasi yang diungkapkan atau tidak diungkapkan kemungkinan juga akan terbukti bermanfaat dalam penelitian masa depan.

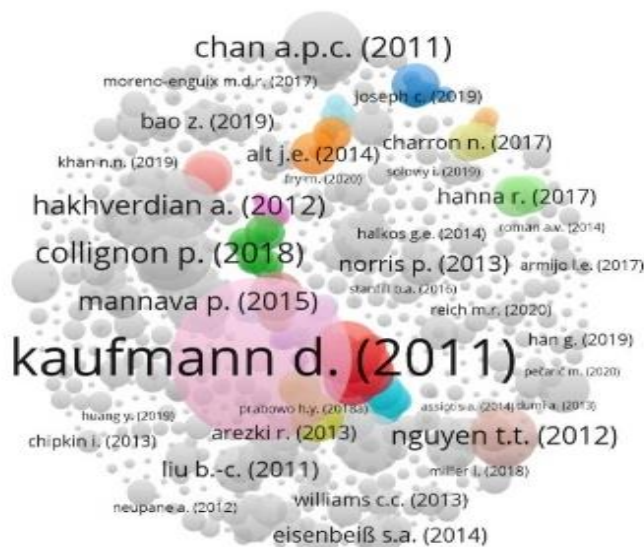


**Gambar 4.** Citation of Country

Informasi tentang MARA University of Technology dan Amerika Serikat ini seharusnya menjadi stimulus bagi para peneliti Indonesia untuk lebih terpacu untuk mempublikasikan karya tentang korupsi di sektor publik. Meski kasus korupsi merajalela di Indonesia, belum banyak penelitian yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional. Kajian dari Indonesia yang berhasil dipublikasikan antara lain:

- a. *"Building anti-corruption compliance through national integrity system in Indonesia (a way to fight against corruption)"* oleh Lukito (2016) membahas Sistem Integritas Nasional di antara semua lembaga publik atau pemerintah dan lembaga swasta. Sistem Kepatuhan Integritas Nasional dan Anti Korupsi merupakan alat penting untuk mencegah kejahatan keuangan dan berupaya memberikan perspektif baru di semua lembaga publik dan swasta melalui implementasinya di semua kegiatan bisnis. Pelaku bisnis juga berperan penting dalam mengembangkan lingkungan bisnis yang baik dan berkelanjutan di Indonesia. Mendorong Sistem Integritas Nasional di setiap bidang usaha merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperkuat daya saing ekonomi
- b. *"De-normalizing corruption in the Indonesian public sector through behavioral re-engineering"* oleh Prabowo et al. (2017) membahas pendekatan terbaik untuk mengurangi korupsi di sektor publik Indonesia. Artikel ini menggunakan tiga teori perilaku, yaitu Teori Skematik, Teori Normalisasi Korupsi, dan Teori Perkembangan Moral. Normalisasi korupsi di Indonesia merupakan warisan rezim Orde Baru yang membentuk skema masyarakat, organisasi, dan individu di Indonesia. Gaya kepemimpinan patrimonial, khususnya di pemerintahan daerah, telah mengakibatkan meningkatnya aktivitas rent-seeking dalam sistem desentralisasi. Normalisasi korupsi yang sistematis selama tiga dekade di sektor publik Indonesia hanya dapat dibalikkan melalui inisiatif de-normalisasi yang panjang dan sistematis. Untuk merancang langkah-langkah intervensi terbaik, pembuat keputusan pertama-tama harus mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk tiga pilar normalisasi: pelembagaan, rasionalisasi, dan normalisasi. Langkah-langkah seperti peninjauan prosedur operasional secara berkala, penunjukan pemimpin yang bermoral baik, dan program pendidikan antikorupsi, semuanya dapat menjadi bagian dari strategi multifaset untuk meruntuhkan pilar normalisasi
- c. *"Forgetting corruption: unlearning the knowledge of corruption in the Indonesian public sector"* oleh A. Prabowo et al. (2018) menunjukkan bahwa faktor utama di balik regenerasi korupsi dari waktu ke waktu di sektor publik Indonesia adalah fakta bahwa korupsi telah menjadi bagian dari konversi pengetahuan di lembaga-lembaga publik Indonesia begitu lama sehingga penghapusan telah mendarah daging di lembaga-lembaga tersebut. Artikel ini hanya mengandalkan analisis dokumenter untuk menyoroti tren masalah perilaku seputar konversi pengetahuan di sektor publik Indonesia, sehingga penelitian di masa depan harus mencakup wawancara dengan pelaku korupsi dan pemimpin lokal untuk mendapatkan pandangan yang lebih akurat tentang bagaimana konversi pengetahuan berperan dalam pertumbuhan dan regenerasi korupsi di sektor publik Indonesia
- d. *"Why people commit public procurement fraud? The fraud diamond view"* oleh Rustiarini et al. (2019) menyediakan kerangka kerja bagi regulator, auditor, dan karyawan lain untuk digunakan dalam mengenali karakteristik dan sifat anteseden penipuan berdasarkan 'teori berlian penipuan'
- e. *"Reinvigorating the human instrument: An exploratory study on the potential use of CAQDAS in qualitative evaluation of corruption prevention in Indonesia"* oleh H. Y. Prabowo (2020) mengeksplorasi potensi perangkat lunak analisis data kualitatif berbantuan komputer (CAQDAS) untuk mendukung evaluasi kualitatif inisiatif pencegahan korupsi, terutama yang berfokus pada perubahan perilaku. Artikel ini menerapkan prinsip-prinsip penyelidikan kualitatif untuk meletakkan dasar bagi pengembangan alat yang efektif untuk mengevaluasi inisiatif pencegahan korupsi yang berorientasi pada perilaku di Indonesia. Keterbatasan artikel ini hanya mengandalkan analisis dokumenter dalam menilai langkah-langkah evaluasi pencegahan korupsi di Indonesia. Kajian lebih lanjut sebaiknya berupaya melakukan wawancara mendalam dengan para evaluator antikorupsi, terutama dari lembaga antikorupsi negara.

Selanjutnya tampilan hasil analisis sitasi berdasarkan unit analisis dokumen disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Citations

Sebuah artikel yang ditulis oleh Kaufmann dan Vicente (2011) banyak dikutip oleh artikel lain. Dengan demikian, artikel tersebut dianggap sebagai artikel yang paling relevan, berkualitas, dan berpengaruh untuk dijadikan referensi dalam bidang kajian korupsi di sektor publik meskipun usianya relatif. Ini karena artikel ini merangkum metodologi proyek *Worldwide Governance Indicators* (WGI) dan memberikan analisis tentang isu-isu terkait. WGI telah mencakup lebih dari dua ratus negara dan wilayah, mengukur enam dimensi pemerintahan mulai tahun 1996. WGI membahas Akuntabilitas, Stabilitas Politik, Kekerasan/Terrorisme, Efektivitas Pemerintah, Kualitas Regulasi, Supremasi Hukum, dan Pengendalian Korupsi. Indikator agregat didasarkan pada beberapa ratus variabel dasar individu, yang diambil dari berbagai sumber data yang tersedia. Data tersebut mencerminkan survei persepsi responden tentang tata kelola publik, swasta, dan LSM di seluruh dunia. Artikel ini secara eksplisit melaporkan margin kesalahan yang menyertai perkiraan masing-masing negara. Selain Kaufmann dan Vicente (2011) artikel yang ditulis oleh Chan et al. (2011); Collignon et al. (2018); and Hakhverdian and Mayne (2012), juga sangat berpengaruh dalam bidang studi ini dan banyak dikutip oleh penulis lain dalam jaringan. Analisis *co-citation* dari penulis yang dikutip menghasilkan pembentukan empat klaster yang diwakili oleh empat warna berbeda. Gambar 6 menunjukkan pola *co-citation* dari 139 penulis yang dikutip setidaknya 20 kali oleh penelitian dalam sampel penelitian.

Klaster 1 (berwarna merah) mewakili karya dari 48 penulis yang paling banyak dikutip dan merupakan salah satu klaster terbesar. Dari 48 penulis, Tanzi V. muncul sebagai sumber yang paling banyak dikutip. Klaster 2 (berwarna hijau) termasuk 34 penulis, dengan penulis paling menonjol dalam grup ini adalah Shleifer A. Klaster 3 (berwarna biru) terdiri dari 29 penulis, dalam grup ini Svensson J. muncul sebagai penulis yang paling banyak dikutip. Klaster 4 (berwarna kuning) mencakup 28 penulis, dengan penulis yang paling menonjol dalam kelompok ini adalah Kaufman D., Williams C.C., dan Schneider F.

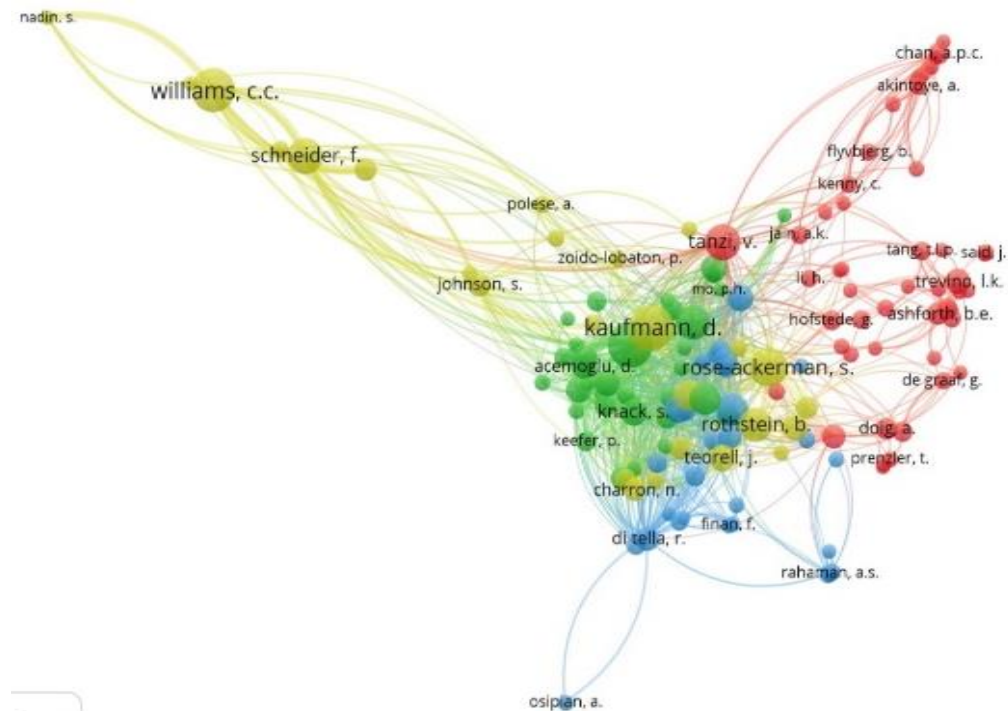
Berdasarkan agregasi bibliografi, artikel yang secara tematis serupa telah dikelompokkan. Hasil analisis dari 618 artikel menggunakan VOS Viewer dikelompokkan menjadi empat klaster. Gambar 7 menunjukkan pola penggabungan artikel bibliografi dengan deskripsi singkat klaster.

Klaster 1: Klaster ini menunjukkan hubungan antara penyebab dan kerentanan korupsi di sektor publik. Klaster 1 berwarna merah dan merupakan klaster terbesar dengan 232 artikel. Artikel yang paling banyak dikutip dalam grup ini adalah "*Investigating the Causal Relationships between Causes of and Vulnerabilities to Corruption in the Chinese Public Construction Sector*" oleh Le et al. (2014) yang dikutip 88 kali.

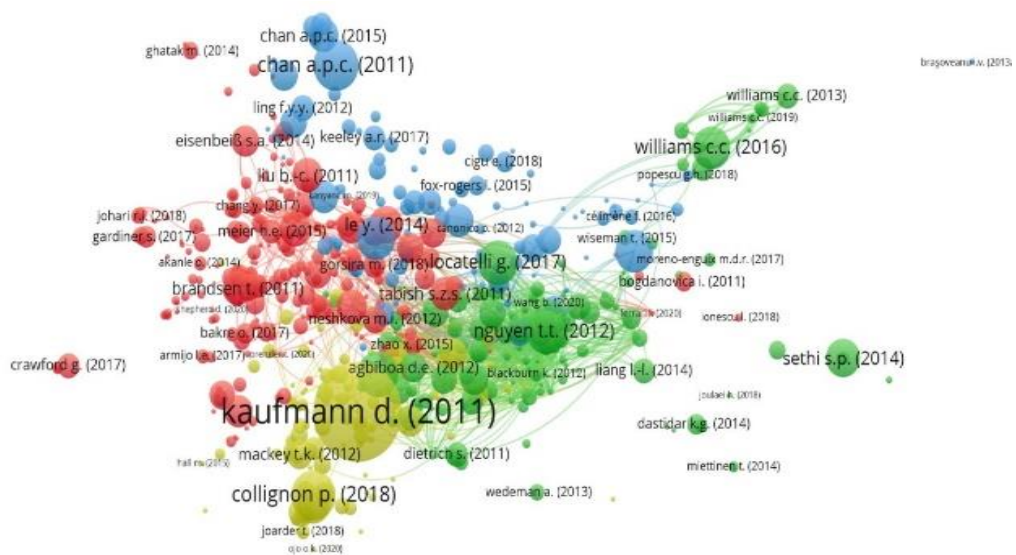
Klaster 2: Klaster ini menunjukkan hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi bagi perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN). Klaster 2 berwarna hijau dan merupakan klaster terbesar kedua dengan 151 artikel. Artikel yang paling banyak dikutip dalam grup ini



adalah *"Corruption, growth, and governance: Private vs. state-owned firms in Vietnam"* oleh Nguyen dan van Dijk (2012) dan dikutip 122 kali.



Gambar 6. Co-citation of Cited Authors

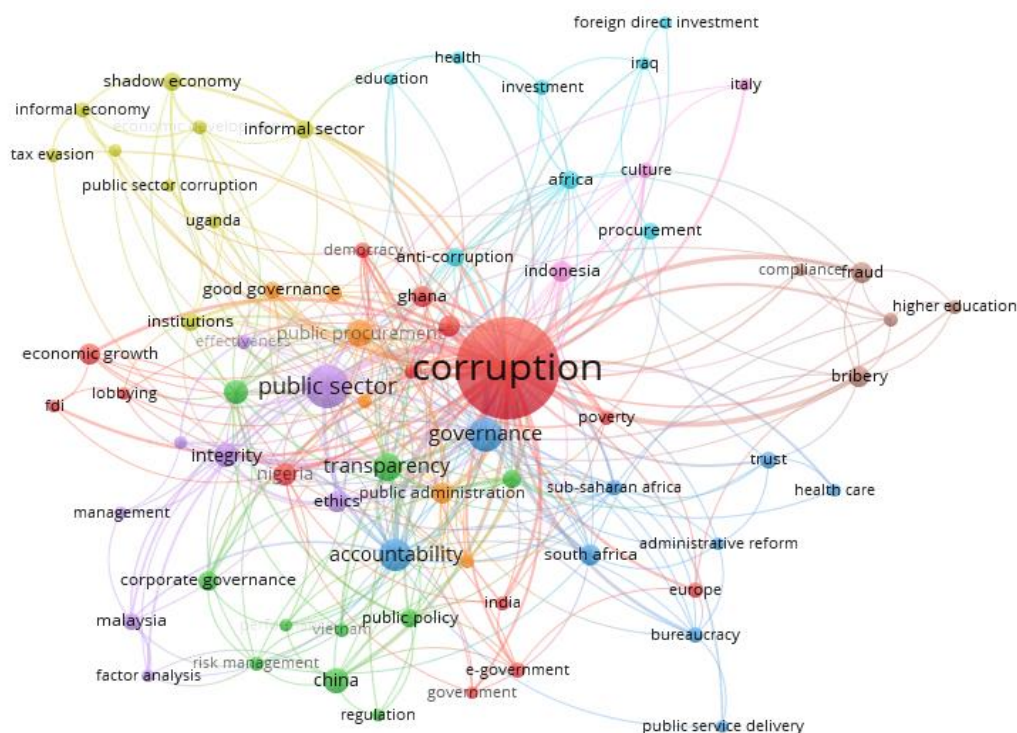


Gambar 7. Bibliographic Coupling of Documents

Klaster 3: Klaster ini menunjukkan proses mengidentifikasi, menilai risiko utama, dan memilih mitigasi risiko yang tepat untuk pelaksanaan proyek antara sektor swasta dan publik. Klaster 3 berwarna biru dan merupakan klaster terbesar ketiga dengan 118 artikel. Artikel yang paling banyak dikutip dalam grup ini adalah *"Empirical Study of Risk Assessment and Allocation of Public-Private Partnership Projects in China"* oleh Chan et al. (2011) dan dikutip 175 kali.

Klaster 4: Klaster ini menunjukkan hubungan antara *Worldwide Governance Indicators* dan korupsi. Klaster 1 berwarna kuning dan memiliki 117 artikel. Artikel yang paling banyak dikutip dalam grup ini adalah *"The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues"* oleh Kaufmann dan Vicente (2011) yang dikutip 840 kali.

Gambar 8 memvisualisasikan jaringan *co-occurrence* kata kunci yang sering digunakan penulis.



**Gambar 8.** *Co-occurrence of Author's Specific Keyword*

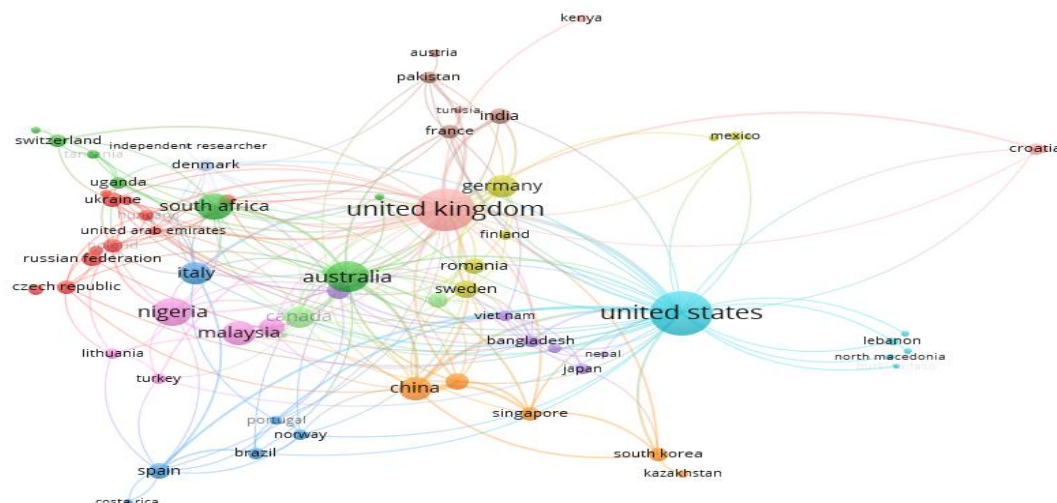
Gambar 8 menunjukkan bahwa "korupsi" adalah konsep yang dipelajari secara luas dan diikuti oleh "sektor publik". Istilah korupsi muncul sebagai kata kunci yang paling banyak digunakan penulis dengan 279 kejadian dan diikuti oleh istilah sektor publik dengan 52 kejadian. Analisis menghasilkan total 73 kata kunci yang dikelompokkan menjadi 9 klaster. Setiap klaster diwakili oleh warna yang berbeda dengan total kekuatan tautan 701. Analisis kata kunci penulis menawarkan beberapa wawasan yang berguna termasuk: (1) Korupsi di sektor publik adalah topik yang masih sangat menarik bagi para peneliti; (2) Kata kunci korupsi sering dikaitkan dengan istilah akuntabilitas, transparansi, tata kelola, suap, budaya, dan penghindaran pajak; (3) Korupsi juga dapat terjadi di sektor nirlaba; dan (4) Korupsi juga telah ditemukan di berbagai belahan dunia termasuk Cina, Eropa, Afrika, Irak, Italia, Uganda, dan Indonesia.

Kata kunci yang dapat menjadi peluang untuk penelitian lebih lanjut tercermin dalam visualisasi overlay VOSviewer berikut (Gambar 9). Berdasarkan Gambar 9 terlihat bahwa kata-kata yang diwakili dalam warna hijau pudar dengan ukuran kecil menunjukkan istilah yang belum banyak dipelajari, seperti kata-kata manajemen, regulasi, penghindaran pajak, perawatan kesehatan, investasi, dan lain-lain. Ini adalah arah potensial untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, jaringan *co-authorship* dilakukan untuk menentukan jumlah kolaborasi antara penulis, organisasi, dan negara. Penelitian kolaboratif menghasilkan artikel penelitian dengan kualitas yang jauh lebih baik. Gambar 10 menunjukkan jaringan kolaborasi antara penulis dalam setidaknya satu artikel penelitian.

Hasil analisis yang divisualisasikan pada Gambar 9 menghasilkan total 108 penulis yang dikelompokkan ke dalam 33 klaster yang diwakili oleh warna yang berbeda. Chan et al. (2011) membentuk jaringan kolaborasi penulis terbesar dengan total 23 artikel yang disusun bersama dan termasuk dalam Klaster 1 berwarna merah.

Gambar 11 menunjukkan jaringan *co-authorship* dari negara-negara yang berafiliasi dengan penulis yang menerbitkan setidaknya satu artikel antara tahun 2011 dan 2020. Ambang batas diterapkan pada minimal 10 jumlah kutipan dari suatu negara yang menghasilkan total 72 negara. Amerika Serikat muncul sebagai negara dengan total link strength tertinggi di antara semua negara. Tidak ada hubungan antara negara-negara seperti Iran, Brunei Darussalam, dan Kamerun. Di sisi lain, terdapat jaringan kerjasama yang kuat antara negara-negara seperti Inggris, Australia, Jerman, Cina, Italia, Nigeria, India, Bangladesh, dan Ukraina.





**Gambar 11.** Co-authorship Network of Author Affiliated Countries

### Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa topik korupsi di sektor publik masih sangat menarik minat para peneliti. Chan et al. (2011); Williams dan Shahid (2016) adalah penulis artikel paling produktif di bidang ini, sedangkan artikel yang ditulis oleh Kaufmann dan Vicente (2011) adalah artikel yang banyak dikutip oleh artikel lain. Artikel publikasi lain yang banyak dikutip secara garis besar: bagaimana memahami hubungan antara penyebab dan kerentanan korupsi di sektor publik Le et al. (2014); hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi bagi perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) oleh Nguyen dan van Dijk (2012); bagaimana mengidentifikasi, menilai risiko utama, dan mengurangi risiko yang sesuai untuk pelaksanaan proyek antara sektor swasta dan publik oleh Chan et al. (2011). Kata kunci yang dapat menjadi peluang penelitian lebih lanjut untuk dijadikan topik penelitian adalah istilah-istilah seperti manajemen, regulasi, penghindaran pajak, perawatan kesehatan, dan investasi. Literatur penelitian ini terbatas pada database Scopus saja dan tidak mencakup publikasi konferensi, editorial, atau bab buku yang ditinjau lebih lanjut, sehingga penelitian tentang korupsi di sektor publik yang diindeks oleh Scopus mungkin lebih luas daripada penangkapan kata kunci penulis. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat mengakses beberapa database yang berbeda seperti Google Scholar, Proquest, IEEE Explore, Dimensions API, dan ABI/Inform. Studi penelitian masa depan juga dapat menggunakan pencarian kata kunci manual untuk menemukan studi yang sesuai dalam literatur yang ada. Studi penelitian di masa depan juga dapat mengambil manfaat dari alat bibliometrik lain seperti Bib excel, HistCite, dan Gephi untuk hasil visualisasi yang lebih baik dan gambaran umum yang komprehensif. Terlepas dari keterbatasan yang disebutkan di atas, artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang penelitian korupsi di sektor publik yang kami harap akan memperluas dan memajukan penelitian tentang topik ini.

### Daftar Pustaka

- ACFE Indonesia Chapter. (2020). *Survei fraud Indonesia 2019*. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter.
- Alam, M., & Said, J. (2015). Public accountability system: Empirical assessment of public sector of Malaysia. *Said, J., Alam, MM, and Aziz, MA, 8(2)*, 225–236. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2942718](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2942718)
- Alamsyah, W. (2020). *Laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2020*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/>
- Bahoo, S. (2020). Corruption in banks: A bibliometric review and agenda. *Finance Research Letters, 35*, 101499. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101499>
- Bahoo, S., Alon, I., & Floreani, J. (2021). Corruption in economics: a bibliometric analysis and

- research agenda. *Applied Economics Letters*, 28(7), 565–578.  
<https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1764476>
- Banerjee, R., Baul, T., & Rosenblat, T. (2015). On self selection of the corrupt into the public sector. *Economics Letters*, 127, 43–46. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2014.12.020>
- Bihanding, H. (2018). Fenomena perilaku koruptif analisis penyebab timbulnya perilaku koruptif di Indonesia. *Jurnal Inspirasi*, 9(1), 1–8.  
<https://doi.org/10.35880/inspirasi.v9i1.109>
- Célimène, F., Dufrénot, G., Mophou, G., & N'Guérékata, G. (2016). Tax evasion, tax corruption and stochastic growth. *Economic Modelling*, 52, 251–258.  
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.10.055>
- Chan, A. P. C., Yeung, J. F. Y., Yu, C. C. P., Wang, S. Q., & Ke, Y. (2011). Empirical study of risk assessment and allocation of public-private partnership projects in China. *Journal of Management in Engineering*, 27(3), 136–148. <https://shaghoool.ir/Files/2011-060.pdf>
- Collignon, P., Beggs, J. J., Walsh, T. R., Gandra, S., & Laxminarayan, R. (2018). Anthropological and socioeconomic factors contributing to global antimicrobial resistance: a univariate and multivariable analysis. *The Lancet Planetary Health*, 2(9), e398–e405.  
[https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(18\)30186-4](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(18)30186-4)
- Deni, S. (2010). *Korupsi birokrasi: konsekuensi, pencegahan & tindakan dalam etika administrasi publik*. Naufan Pustaka.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Faisal, A. A. (2018). Pencegahan dan deteksi kasus korupsi pada sektor publik dengan fraud triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(4).  
<https://doi.org/10.32424/jeba.v20i4.1238>
- Fisman, R., & Golden, M. A. (2017). *Corruption: What everyone needs to know*. Oxford University Press.
- Hakhverdian, A., & Mayne, Q. (2012). Institutional trust, education, and corruption: A micro-macro interactive approach. *The Journal of Politics*, 74(3), 739–750.  
<https://doi.org/10.1017/S0022381612000412>
- Hui, W. S., Othman, R., Omar, N. H., Rahman, R. A., & Haron, N. H. (2011). Procurement issues in Malaysia. *International Journal of Public Sector Management*, 24(6), 567–593.  
<https://doi.org/10.1108/09513551111163666>
- Joseph, C., Gunawan, J., Madi, N., Janggu, T., Rahmat, M., & Mohamed, N. (2019). Realising sustainable development goals via online integrity framework disclosure: Evidence from Malaysian and Indonesian local authorities. *Journal of Cleaner Production*, 215, 112–122.  
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.01.057>
- Kaufmann, D., & Vicente, P. C. (2011). Legal corruption. *Economics & Politics*, 23(2), 195–219.  
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2010.00377.x>
- Le, Y., Shan, M., Chan, A. P. C., & Hu, Y. (2014). Investigating the causal relationships between causes of and vulnerabilities to corruption in the Chinese public construction sector. *Journal of Construction Engineering and Management*, 140(9), 5014007.  
[https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/\(ASCE\)CO.1943-7862.0000886](https://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000886)
- Lukito, A. S. (2016). Building anti-corruption compliance through national integrity system in Indonesia. *Journal of Financial Crime*, 23(4), 932–947. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2015-0054>
- Matulessy, A., Rini, A., Limanago, Y., Elentina, M., & Pandin, M. (2021). *The causing corruption factors of private employees and civil servants* (202101.0197.v1). Preprints.  
<https://www.preprints.org/manuscript/202101.0197/v1>
- Muttiarni, M. (2021). The study of individual morality and internal control and the relationship on accounting fraud. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 28–36.

<https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i1.593>

- Nguyen, T. T., & van Dijk, M. A. (2012). Corruption, growth, and governance: Private vs. state-owned firms in Vietnam. *Journal of Banking & Finance*, 36(11), 2935–2948. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.03.027>
- Nugraha, Y. A., & Etikariena, A. (2021). Anteseden corrupt intention: analisis peran dark triad personality dan hierarchy culture. *Jurnal Ecopsy*, 8(1), 41. <https://doi.org/10.20527/ecopsy.2021.02.004>
- Nuswantara, D. A., & Maulidi, A. (2020). Psychological factors: self- and circumstances-caused fraud triggers. *Journal of Financial Crime*, 28(1), 228–243. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2020-0086>
- Prabowo, A., Kusdinar, U., & Rahmawati, U. (2018). Pelatihan pengembangan instrumen tes mata pelajaran matematika SMP. *International Journal of Community Service Learning*, 2(3). <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v2i3.14189>
- Prabowo, H. Y. (2020). Reinvigorating the human instrument. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 505–530. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0004>
- Prabowo, H. Y., Cooper, K., Sriyana, J., & Syamsudin, M. (2017). De-normalizing corruption in the Indonesian public sector through behavioral re-engineering. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 552–573. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2015-0057>
- Putri, C. F., & Yanti, H. B. (2020). Pengaruh fraud diamond terhadap tindak pidana korupsi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–72. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/6916>
- Rustiarini, N. W., T., S., Nurkholis, N., & Andayani, W. (2019). Why people commit public procurement fraud? The fraud diamond view. *Journal of Public Procurement*, 19(4), 345–362. <https://doi.org/10.1108/JOPP-02-2019-0012>
- Sforza, V., Cimini, R., Mechelli, A., & Vian, T. (2020). A review of the literature on corruption in healthcare organizations. *International Journal of Business and Management*, 15(4), 98. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v15n4p98>
- Siddique, M. A. B., & Ghosh, R. N. (2014). *Corruption, good governance and economic development: Contemporary analysis and case studies* (Vol. 28). World Scientific.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud auditing and forensic accounting* (Vol. 11). John Wiley & Sons.
- Sofhian, S. (2020). Penyebab dan pencegahan korupsi: Kasus Indonesia. *Jurnal Diklat Keagamaan*, XIV(1), 65–76.
- Strozzi, F., Colicchia, C., Creazza, A., & Noè, C. (2017). Literature review on the ‘Smart Factory’ concept using bibliometric tools. *International Journal of Production Research*, 55(22), 6572–6591. <https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1326643>
- Uribe-Toril, J., Ruiz-Real, J. L., Ceresia, F., & Valenciano, J. de P. (2019). Corruption and entrepreneurship: A bibliometric analysis. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(4), 1–11. <https://iris.unipa.it/handle/10447/394725>
- Williams, C. C., & Shahid, M. S. (2016). Informal entrepreneurship and institutional theory: explaining the varying degrees of (in)formalization of entrepreneurs in Pakistan. *Entrepreneurship & Regional Development*, 28(1–2), 1–25. <https://doi.org/10.1080/08985626.2014.963889>
- Yanti, H. B. (2021). Faktor determinan pemicu korupsi di sektor pemerintahan (studi pada pegawai negeri sipil di Jakarta). *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 104–117. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.27>
- Zhai, Z., Shan, M., Darko, A., & Chan, A. P. C. (2021). Corruption in construction projects: bibliometric analysis of global research. *Sustainability*, 13(8), 4400. <https://doi.org/10.3390/su13084400>